

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN TAMBAHAN PENGALAMAN MENJABAT DAN SYARAT USIA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU - XXI/2023)

Yohana Sekar Pawening 2310622022, Wicipto Setiadi, Taufiqurrohman Syahuri

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai pengaturan yang berbeda dengan pelaku kehakiman lainnya. Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel “sebagian”, sehingga menjadi “mengabulkan sebagian”. Rumusan masalah yang diperoleh yaitu bagaimana peta pendapat hukum (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai komposisi persyaratan usia dan pengalaman menjabat sebagai kepala daerah dan apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU - XXI/2023 dapat disidang ulang setelah terbukti terdapat pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang turut memutus. Penelitian hukum ini dengan menggunakan metode normatif empiris yang utamanya fokus pada cara masyarakat menggunakan aturan hukum positif untuk merespon berbagai macam peristiwa hukum yang terjadi. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan komposisi pengambilan keputusan, tidak hanya merepresentasikan independensi Hakim Konstitusi semata, tetapi juga merepresentasikan hal lain yang dapat disimpulkan baik secara tersurat maupun tersirat dalam pertimbangan *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi. Dari ketentuan aturan yang mengatur tentang putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa adanya pelanggaran kode etik atau tindak pidana yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi pengaruhnya hanya terhadap diri hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pendapat Berbeda, Kode Etik.

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF ADDITIONAL EXPERIENCE REQUIREMENTS AND AGE CONDITIONS IN THE NOMINATION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT**

***(Analysis of Constitutional Court Decision Number 90/PUU - XXI/2023)***

Yohana Sekar Pawening 2310622022, Wicipto Setiadi, Taufiqurrohman Syahuri

*The Constitutional Court is one of the actors of judicial power that has different regulations from other judicial actors. In Case Number 90/PUU-XXI/2023, it not only deviates from the considerations and the ruling but also reverses the ruling 180 degrees from rejecting to granting, albeit with the addition of the term "partially," thus becoming "partially granting." The problem formulation obtained is how the map of legal opinions (Dissenting Opinion) in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the composition of age requirements and experience serving as regional heads and whether the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 can be retried after it is proven that there has been a serious ethical violation committed by the Chief Justice of the Constitutional Court who also decided the case. This legal research uses an empirical normative method that primarily focuses on how society uses positive legal rules to respond to various legal events that occur. In the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the decision-making composition not only represents the independence of the Constitutional Judges but also represents other matters that can be concluded both explicitly and implicitly in the considerations of the Dissenting Opinion of the Constitutional Judges. From the provisions regulating the decisions of the Constitutional Court, it is stated that any ethical violations or criminal acts committed by the judges of the Constitutional Court only affect the judges themselves.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Dissenting Opinion, Code of Ethics.*